

Daftar Periksa (*Checklist*) Gender



PEMBANGUNAN PERKOTAAN
DAN PERUMAHAN

Daftar Isi

Tujuan daftar periksa (<i>checklist</i>)	2
Mengapa gender penting dalam proyek pembangunan perkotaan dan perumahan?	3
Pertanyaan-pertanyaan penting dan langkah aksi utama dalam siklus proyek	7
Analisis gender	10
Desain proyek	20
Dialog kebijakan	34
Appendix: Contoh Terms of Reference (TOR) untuk Spesialis Gender	36
Referensi	37

Singkatan

BME	Benefit Monitoring and Evaluation (Monitoring dan Evaluasi atas Manfaat)
CBO	Community-Based Organization (Organisasi Berbasis Komunitas)
DMC	Developing Member Country (Negara-negara Berkembang Anggota ADB)
GAD	Gender and Development (Gender dan Pembangunan)
ISA	Initial Social Assessment (Kajian Sosial Awal)
M&E	Monitoring and Evaluation (Monitoring dan Evaluasi)
NGO	Non-Government Organization (Organisasi Nonpemerintah)
O&M	Operation & Maintenance (Operasional dan Pemeliharaan)
RRP	Report and Recommendation of the President (Laporan dan Rekomendasi Presiden)
SA	Social Assessment (Kajian Sosial)
SOCD	Social Development Division, Office of Environment and Social Development (Divisi Pembangunan Sosial, Kantor Pembangunan Lingkungan dan Sosial)
TOR	Terms of Reference (Kerangka Acuan)
WID	Women In Development (Perempuan dalam Pembangunan)
UDH	Urban Development and Housing (Pembangunan perkotaan dan Perumahan)
WUG	Water Use Group (Kelompok Pengguna Air)

Tujuan Daftar periksa (*checklist*)

Tujuan dari daftar periksa (*checklist*) ini adalah untuk membantu para staf dan konsultan ADB mengimplementasikan kebijakan dan sasaran-sasaran strategis ADB dalam hal gender dan pembangunan (gender and development/ GAD) (lihat *ADB's Policy on Gender and Development, May 1998*). Daftar periksa (*checklist*) ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para pengguna untuk mengidentifikasi isu-isu utama mengenai gender dalam sektor pembangunan perkotaan dan perumahan atau *urban development and housing* (UDH) dan mendesain strategi yang peka gender, berikut komponen-komponen serta indikator-indikator yang sesuai untuk menjawab isu-isu gender pada seluruh tahapan siklus proyek/program.

Staf ADB harus menggunakan daftar periksa (*checklist*) ini untuk mengidentifikasi isu-isu gender dalam *initial social assesment* (ISA) selama fase pencarian—fakta bantuan teknis persiapan proyek atau *project pre-patarory technical assistance* (PPTA). Para konsultan harus menggunakan daftar periksa (*checklist*) gender ini pada saat melakukan analisis sosial rinci selama PPTA. Meskipun demikian, harus diperhatikan bahwa tidak semua pertanyaan dalam daftar periksa ini relevan untuk semua proyek. Staf ADB maupun konsultan harus menyeleksi pertanyaan-pertanyaan yang paling relevan untuk konteks proyek tertentu.

Dokumen ini juga berisi pedoman untuk menyusun *terms-of-reference*

yang sensitif-gender untuk ISA dan analisis sosial, termasuk studi kasus dari portofolio proyek ADB, untuk menunjukkan praktek-praktek terbaik dalam upaya memasukan isu gender dalam proyek-proyek kesehatan.

Dalam persiapan proyek, daftar periksa (*checklist*) ini bisa digunakan bersama-sama dengan *ADB's Handbook for Incorporation of Social Dimensions in Project (1994), Guidelines on Benefit Monitoring and Evaluation*, dan seri paper-paper singkat mengenai wanita perempuan dalam pembangunan. Referensi lain yang bermanfaat dicantumkan pada bagian belakang dokumen ini. Karena sektor pembangunan perkotaan sering mengandung komponen penyediaan air dan sanitasi, maka *Daftar Periksa (Checklist) Gender Dalam Penyediaan Air dan Sanitasi (2000)* juga menjadi referensi yang bermanfaat. Referensi lain yang bermanfaat dicantumkan pada bagian belakang buku ini.

Daftar periksa (*checklist*) ini disusun oleh Sonomi Tanaka dari Divisi Pembangunan Sosial (SOCD), Kantor Pembangunan Lingkungan dan Sosial, dengan menggunakan daftar yang disusun oleh staf konsultan, Penelope Schoeffel, dan di bawah bimbingan teknis oleh Shireen Lateef dari SOCD. Mary Ann Asico melakukan editing pada teks, dan Jundela Cruz menyusun tata letak akhir. Bantuan produksi diberikan oleh Elisa Lacerona.

Mengapa Gender Penting dalam Proyek Pembangunan Perkotaan dan Perumahan?¹

Pembangunan perkotaan dan Perumahan atau *urban development and housing* (UDH) mencakup berbagai subsektor: penyediaan air, pengelolaan sampah/buangan, pembuangan air, transportasi, penyediaan listrik, perumahan, perencanaan penggunaan lahan, perbaikan wilayah kumuh, sanitasi dan kebersihan, pengelolaan lingkungan, dan penyediaan lapangan kerja. Proyek-proyek UDH biasanya berlangsung di wilayah-wilayah yang memiliki kompleksitas sosial dan berpopulasi padat. Gender hanya merupakan salah satu dari sekian banyak aspek yang perlu diperhatikan, namun merupakan suatu hal yang sangat penting.

Beberapa pengalaman sebelumnya dalam proyek-proyek UDH yang didanai oleh ADB dan dana dari donor lainnya, telah memberikan berbagai pelajaran, mengenai pentingnya gender, yaitu sebagai berikut:

Pelajaran 1. Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan peranan, kebutuhan-kebutuhan dan persepsi-persepsi terhadap UDH. Upaya yang sadar untuk memahami pandangan mereka akan mengarahkan pada desain dan kinerja proyek yang lebih baik.

Kaum perempuan merupakan kolektor, transporter, pengguna, dan pengelola air untuk keperluan rumah tangga dan promotor kegiatan-kegiatan sanitasi berbasis komunitas yang utama. Kaum perempuan juga memainkan peran penting dalam pengelolaan pembuangan sampah dan pengelolaan

¹ Bagian ini diambil dari ADB (2000), Fong *et al.* (1996), dan Woronluk and Schalkwyk (1998)

Pertimbangkan tempat berlindung kaum perempuan, tempat penampungan anak-anak, dan tempat penginapan bagi perempuan pekerja dalam perencanaan ruang perkotaan. Untuk jasa transportasi, bangun kamar kecil yang terpisah di depot-depot dan pertimbangkan pelayanan bus atau kereta api khusus untuk kaum perempuan.

lingkungan. Karena kaum perempuan memikul tanggung jawab utama dalam urusan rumah tangga, maka dalam pembuatan rumah baru atau dalam perbaikan rumah yang sudah ada, termasuk penerangan dan ventilasi, harus mencerminkan kebutuhan mereka.

Selain itu, berdasarkan pengalaman pada beberapa wilayah, bukti menunjukkan bahwa menargetkan perempuan sebagai pelanggan individual dapat lebih meningkatkan jumlah hubungan ke pelayanan penyediaan air dan pembuangan limbah daripada melalui pendekatan lain yang tidak menargetkan perempuan sebagai pelanggan individual. Hal ini memiliki dampak besar terhadap strategi pemasaran para penyedia jasa, baik sektor publik maupun swasta yang memiliki masalah-masalah kesinambungan finansial.²

Namun, dalam banyak masyarakat, pandangan kaum perempuan tidak terwakili secara sistematis dalam lembaga-lembaga pembuat keputusan. Proyek-proyek UDH memberikan kesempatan utama untuk mempersempit kesenjangan ini.

Pelajaran 2. Fokus pada gender memiliki efek berganda

Dengan memfokuskan pada gender akan membawa manfaat lebih dari sekedar pelaksanaan proyek UDH yang baik, yang terwujud dalam aspek-aspek seperti: pengadaan yang baik,

² Pada Proyek Pembangunan perkotaan di Sulawesi dan Irian Jaya di Indonesia yang didanai oleh Bank Dunia, perusahaan air minum milik pemerintah daerah, PDAM, dihadapkan pada masalah kesinambungan finansial, utamanya oleh karena sedikitnya permintaan penyambungan oleh pelanggan. Dua kecamatan di kotapraja Palu di Sulawesi Tengah dipilih untuk pemasaran percontohan penyambungan air, dengan sebuah subdistrik menargetkan perempuan sebagai pelanggannya, dan lainnya menargetkan kaum laki-laki. Selama 4 bulan terdapat pemasaran ekstensif melalui pertemuan dengan masyarakat yang diselenggarakan oleh staf pemasaran, distribusi brosur, dan kunjungan dari rumah ke rumah. Kampanye pemasaran tersebut yang menargetkan perempuan menghasilkan sejumlah besar penyambungan baru (30 dari 450 buah rumah tangga). Ukuran sampel mungkin terlalu sedikit untuk melakukan generalisasi yang singkat terhadap hasilnya. Namun, kajian ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang memfokuskan pada peran kaum perempuan sebagai pelanggan air bersih dapat membantu meningkatkan jumlah penyambungan. Hal ini disebabkan karena peran utama perempuan sebagai pengelola air rumah tangga. Di lain pihak, hal ini tidaklah benar secara keseluruhan, karena tingkat kekuatan pengambilan keputusan oleh kaum perempuan di dalam rumah tangga sangat bervariasi dalam berbagai masyarakat (Haryatiningsih 1997).

operasional dan pemeliharaan (O&M), perbaikan biaya, dan kesadaran kebersihan. Manfaat-manfaat tersebut termasuk:

- **Manfaat ekonomi:** Akses yang lebih baik pada infrastruktur perkotaan dan pelayanan memberikan kondisi hidup yang lebih baik bagi kaum perempuan, meningkatkan kesehatan dan produktivitas mereka. Selain itu, dengan mengurangi waktu yang digunakan untuk mengumpulkan air dan pengelolaan sanitasi memberikan lebih banyak waktu bagi kaum perempuan untuk melakukan kegiatan yang mendatangkan pendapatan, perawatan anggota keluarga, atau kesejahteraan dan kesenangan mereka sendiri. Sehingga, ekonomi secara keseluruhan akan bisa mendapatkan manfaatnya.
- **Manfaat bagi anak-anak:** Dengan terbebas dari beban mengumpulkan dan mengelola air, maka anak-anak khususnya anak gadis dapat bersekolah. Kesehatan mereka pun akan meningkat. Dengan demikian, diperkirakan dampaknya merupakan dampak berkelanjutan antar generasi.
- **Pemberdayaan kaum perempuan:** Keterlibatan dalam proyek-proyek UDH yang memberdayakan kaum perempuan, terutama apabila aktivitas proyek tersebut terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan sumber daya produktif seperti kredit (lihat Kotak 2).

Pelajaran 3. Isu gender bisa diselesaikan dengan lebih baik melalui pendekatan yang responsif pada kebutuhan-kebutuhan kaum miskin dan mendorong partisipasi para *stakeholder*.

Baik pendekatan berbasis komunitas maupun pendekatan sektor swasta berskala besar, fokus pada pengentasan kemiskinan dan partisipasi para penerima manfaat (*beneficiaries*) menjadi dua kunci lain yang menentukan efektivitas dan

Untuk mempromosikan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan perumahan dan aktivitas-aktivitas kelompok yang lain, masukkan pelatihan manajemen dan kepemimpinan untuk wanita dalam proyek

kesinambungan pengelolaan UDH. Proyek UDH harus berfokus pada kaitan antara gender dan kemiskinan dengan mengidentifikasi, misalnya, rumah tangga-rumah tangga yang dikepalai kaum perempuan dan kebutuhan rumah tangga tersebut. Hal ini sangat penting dalam pembangunan daerah kumuh, karena banyak rumah tangga di wilayah-wilayah kumuh dikepalai oleh kaum perempuan. Proyek UDH juga harus memperhatikan berbagai kendala partisipasi kaum perempuan dalam desain proyek, konstruksi, *operation and maintenance* (O&M), pelatihan serta monitoring dan evaluasi (M&E).

Untuk menjangkau kaum perempuan, gunakan saluran-saluran informasi yang dapat diakses oleh mereka, seperti pusat-pusat kegiatan masyarakat, serikat-serikat dagang, kelompok-kelompok perempuan dan kelompok-kelompok keagamaan. Selain itu, strategi media harus memperhatikan jenis media dan waktu untuk mengkampanyekan informasi yang sesuai untuk kelompok target tersebut. Bagi kaum perempuan, kampanye-kampanye melalui radio, TV, dan kampanye-kampanye melalui papan *billboard* lebih efektif daripada kampanye melalui surat kabar. Iklan-iklan harus diudarakan pada saat kaum perempuan berada di rumah dan tidak sibuk.

Pelajaran 4. Apabila pendekatan berbasis komunitas relevan, maka harus digunakan pendekatan adaptif, pembelajaran, dan pendekatan yang berorientasi pada proses; oleh karena itu, dialog yang berkesinambungan antara otoritas proyek dan kaum perempuan dan laki-laki penerima manfaat menjadi penting.

Para penerima manfaat dari proyek ini kemungkinan akan memiliki rasa memiliki yang lebih kuat apabila proyek memberi waktu yang cukup, fleksibilitas desain, dan otoritas untuk mengambil tindakan-tindakan korektif. Dengan cara ini, mereka akan merasa lebih mudah untuk memasukkan pembelajaran awal mereka dan bernegosiasi dengan para staf proyek serta penyedia jasa. Hal ini terutama benar apabila norma masyarakat tidak mengharuskan partisipasi kaum perempuan. Oleh karena itu, mekanisme yang memungkinkan adanya interaksi dua arah antara para penerima manfaat dengan penyedia jasa harus dibangun ke dalam proyek.

Pertanyaan-pertanyaan Penting dan Langkah Aksi Utama dalam Siklus Proyek

Tiga alat utama yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menangani isu gender dalam siklus proyek adalah: analisis gender, desain proyek, dan dialog kebijakan.

Analisis gender merupakan bagian integral dari Kajian Sosial Awal/*initial social assesment* (ISA) dalam fase pencarian-fakta Bantuan Teknis Persiapan Proyek/*project preparatory technical assistanec* (PPTA) serta Kajian Sosial/*social assesment* (SA) selama implementasi PPTA. Desain proyek yang peka-gender didasarkan pada analisis gender, dan harus dimasukkan ke dalam laporan akhir PPTA dan dalam Laporan Rekomendasi

Presiden/*report and recommendation of the President* (RRP). Dialog kebijakan dengan lembaga pelaksana dan lembaga-lembaga lainnya dalam negara sedang berkembang anggota ADB/*Developing Members Countries* (DMC) harus merupakan proses yang berkelanjutan, yang berlaku pada semua tahapan dalam siklus proyek tersebut. Temuan dan rekomendasi dari analisis gender dalam perencanaan proyek dan umpan balik dari para penerima manfaat, selama implementasi tersebut harus didiskusikan secara cermat untuk menentukan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Apabila terdapat rencana untuk melakukan pertemuan konsultasi, pastikan berkonsultasi baik dengan kaum perempuan maupun laki-laki. Apabila segregasi gender sudah menjadi norma di masyarakat tersebut, pertimbangkan untuk melakukan pertemuan terpisah antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Hal ini akan memungkinkan kaum perempuan untuk mengekspresikan pandangan mereka dengan lebih terbuka dan suara mereka menjadi didengar. Dalam pertemuan bersama, susunan tempat duduk harus diperhatikan.

Tabel 1

Memperhatikan gender dalam siklus proyek: *Action point* utama

SIKLUS PROYEK	TANGGUNG JAWAB
ISA dalam pencarian-fakta PPTA	Pemimpin misi/konsultan
SA dalam studi kelayakan PPTA	Konsultan bekerja sama dengan Divisi Pembangunan Sosial, Kantor Pembangunan Lingkungan dan Sosial / Office of Environment and Social Development (SOCD) dan mitra dari DMC
Membuat draf serta memfinalisasi RRP dan perjanjian pinjaman	Pemimpin misi, SOCD
Negosiasi pinjaman	Pemimpin misi
Implementasi	Departemen Proyek, personel DMC
Monitoring dan Evaluasi Manfaat/Benefit Monitoring and Evaluation (BME)	Departemen Proyek, personel DMC

SIKLUS PROYEK

- Identifikasi isu utama mengenai gender dan partisipasi kaum perempuan dan kebutuhan informasi lain PPTA.
- Identifikasi peran gender dalam sasaran proyek.
- Susun *terms of reference* (TOR) untuk ilmuwan sosial dan spesialis gender PPTA.

- Lakukan analisis gender sebagai bagian dari SA secara keseluruhan.
- Buat profil sosial ekonomi kelompok-kelompok stakeholder dalam populasi sasaran dan pilah data berdasarkan gender.
- Periksa perbedaan-perbedaan gender dalam hal pengetahuan, sikap, praktek, peran, status, kesejahteraan, kendala, kebutuhan, dan prioritas-prioritasnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan tersebut.
- Kaji kapasitas kaum laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas tersebut.
- Kaji dampak potensial proyek tersebut terhadap masing-masing kelompok gender dan kaji pula berbagai pilihan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimumkan dampak yang merugikan.
- Identifikasi lembaga pemerintah dan organisasi nonpemerintah, organisasi-organisasi berbasis komunitas (*community based-organization/CBO*), serta kelompok-kelompok perempuan yang dapat dimanfaatkan selama PPTA dan implementasi proyek. Kaji kapasitas mereka.
- Tinjau ulang kebijakan-kebijakan dan hukum-hukum yang terkait (misal, hukum waris, kelompok-kelompok pengguna air yang dilindungi hukum), sesuai kebutuhan.
- Identifikasi kesenjangan informasi yang terkait dengan isu-isu di atas.
- Libatkan kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam pembuatan proyek.
-

- Pastikan bahwa masalah gender diperhatikan dalam bidang-bidang yang terkait (termasuk sasaran proyek, ruang lingkup proyek, ukuran kemiskinan dan sosial, perkiraan biaya, pengaturan kelembagaan, appendix kajian sosial, dan TOR konsultan untuk implementasi dan dukungan M&E).
- Tentukan klasifikasi proyek berdasarkan gender dan sasaran pembangunan.
- Buat daftar utama aksi gender yang ada dalam peraturan atau ketentuan hukum untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah DMC atau klien sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.

- Buat daftar tindakan-tindakan berdasarkan kondisinya

- Tinjau ulang laporan-laporan perkembangan.
- Modifikasi desain proyek, sesuai keperluan.

- Pantau indikator-indikator manfaat yang dipilah berdasarkan gender.
- Modifikasi desain proyek, sesuai kebutuhan.

Analisis Gender³

Analisis gender proyek biasanya dilakukan sebagai bagian dari ISA atau SA secara keseluruhan. Mungkin bisa diperlukan 1 sampai 3 bulan-orang jasa konsultasi untuk melakukan analisis gender dan pembuatan proyek pendahuluan selama penerapan PPTA, tergantung pada skala dan sifat dasar proyek tersebut. Di sini, metodologi yang digunakan harus diperhatikan. Tindakan-tindakan utama yang akan diambil serta pertanyaan-pertanyaannya yang akan diajukan selama melakukan analisis tersebut adalah sebagai berikut:

Metodologi

Desk Review

- Kaji informasi yang tersedia (misal, statistik, analisis kemiskinan, analisis gender, dokumen-dokumen dari proyek-proyek yang didanai lembaga-lembaga sebelumnya) atas jasa/pelayanan UDH di wilayah proyek tersebut serta profil ekonomi populasi sasaran.
- Kaji hukum-hukum yang terkait (misal, hukum waris, aturan keluarga, peraturan-peraturan kredit kebijakan (misal, air, pembuangan limbah, atau kebijakan bebas subsidi rumah tangga), serta kerangka kerja kelembagaan (misal, sistem administrasi sekarang untuk pelayanan infrastruktur perkotaan) serta dampak-dampak dari gender.

TIP

Kaji dampak hukum-hukum dan peraturan terhadap gender

Survei—rumah tangga (untuk mengetahui lebih rinci, lihat “Data yang dikumpulkan”)

- Buat profil sosial-ekonomi yang dipilah berdasar gender dan identifikasi praktek-praktek UDH pada populasi sasaran, kendala-kendalanya, kebutuhan-kebutuhannya, dan kesediaannya untuk membayar.
- Kumpulkan informasi kuantitatif.

³ Bagian ini banyak diambil dari Woronluk dan Schalkwyk (1998).

Metodologi-metodologi partisipatif (misal, penilaian partisipatif cepat, diskusi kelompok terfokus, wawancara random, tur berjalan kaki).

- Kumpulkan informasi kualitatif yang tidak dapat dikumpulkan melalui survei.
- Tentukan cara-cara agar kaum laki-laki dan perempuan penerima manfaat serta stakeholder lainnya, khususnya kaum perempuan miskin, dapat berpartisipasi dalam proyek tersebut.
- Petakan wilayah-wilayah sasaran. Wilayah mana saja yang paling tidak diuntungkan dari segi akses ke pelayanan dan tingkat kemiskinannya?
- Identifikasi kelompok-kelompok stakeholder utama dan bantuan mereka.

TIP

Perhatikan apakah tim-tim lapangan memiliki keseimbangan gender dari segi anggotanya.

Penempatan Staf

- Pastikan adanya keseimbangan gender yang memadai dalam tim-tim lapangan.
- Pilih anggota tim lapangan yang memiliki kesadaran, pengetahuan tentang wilayah setempat, dan pemahaman budaya serta bersedia mendengarkan.

Data yang harus dikumpulkan

Kerangka makro kelembagaan

- Dampak gender pada kebijakan sektor dan hukum serta kerangka kelembagaan.
- Kapasitas lembaga pelaksana dan komitmen untuk berfokus pada permasalahan dan aspek gender.

Profil sosial-ekonomi

- Demografi
 - Komposisi berdasarkan subwilayah, gender, suku atau kasta, usia, dan lain-lain.
 - Afiliasi dan perbedaan agama.

TIP

Temukan proporsi kaum perempuan yang bekerja dalam rumah dan mereka yang bekerja di luar rumah.

- Kecenderungan migrasi ke luar dan ke dalam (laki-laki dan perempuan).
 - Usia saat menikah, berdasarkan gender.
- Kemiskinan dan pekerjaan
- Tingkat pendapatan rumah tangga dan sumber-sumber individual, berdasarkan gender dan usia.
 - Pola pengeluaran keluarga dan pembuatan keputusan, berdasarkan gender.
 - Profil kemiskinan (misal, persentase populasi di bawah garis kemiskinan, distribusi pendapatan, tingkat kemiskinan, sifat-sifat kemiskinan dan sebab-sebab kemiskinan berdasarkan geografi, strategi-strategi menanggulangnya untuk kaum miskin).
 - Dimensi-dimensi gender atas kemiskinan (yakni hubungan antara rumah tangga-rumah tangga yang dikepalai kaum perempuan serta tingkat kemiskinan, beban kemiskinan terhadap kaum perempuan).
 - Persentase kaum perempuan yang bekerja dalam rumah dan jenis pekerjaan yang dilakukan.
 - Persentase kaum perempuan yang dipekerjakan di luar rumah, apabila mungkin, sebuah analisis pengkategorian pekerjaan.
 - Tingkat pengangguran, berdasarkan gender.
- Penggunaan dan penyewaan tanah
- Profil penyewaan atau kepemilikan (distribusi persentase hunian yang dimiliki atau disewa).
 - Kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan penyewaan atau kepemilikan, apabila ada (yakni asosiasi penyewa).
 - Persentase kaum perempuan yang memiliki hunian atau terdaftar sebagai penyewa tetap.
 - Jumlah lahan/lokasi yang diduduki (antara kaum laki-laki dan kaum perempuan).
 - Lamanya tinggal di tempat sekarang.

- Kesehatan
 - Tingkat pertumbuhan populasi
 - Tingkat kematian kanak-kanak dan ibu (laki-laki dan perempuan).
 - Pelayanan yang tersedia serta cakupan geografis.
 - Tingkat kesuburan serta pengambilan keputusan.
 - Alokasi makanan dan tingkat gizi di dalam rumah tangga, berdasarkan gender.
 - Insiden kekerasan di dalam rumah tangga.
- Pendidikan dan anak-anak
 - Tingkat melek-huruf dan penyesuaian pendidikan, berdasarkan gender.
 - Rasio putus sekolah, berdasarkan gender.
 - Insiden tenaga kerja anak-anak dan anak-anak jalanan, berdasarkan gender.
- Status kaum perempuan
 - Banyaknya kekerasan terhadap perempuan (yakni dalam rumah tangga).
 - Representasi dan kesadaran politik
 - Persepsi-persepsi dan praktek-praktek sosio-kultural antara laki-laki dan perempuan.
 - Kebijakan-kebijakan dan hukum-hukum yang mendiskriminasi berdasarkan gender.
 - Akses kaum perempuan pada hukum dan keadilan, khususnya dalam hubungannya dengan kekerasan dan tindakan kriminal.
- Peran gender dan tanggung jawabnya.
 - Pembagian gender atas tenaga kerja secara luas dalam tanggung jawab produktif (yakni pertanian, dan kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan) serta tanggung jawab-tanggung jawab reproduktif (yakni tugas-tugas rumah tangga, perawatan anak), dan waktu yang dialokasikan untuk melakukan setiap tanggung jawab itu.

TIP

Kaji bagaimana status kaum perempuan dipengaruhi oleh norma-norma sosio-kultural serta hukum-hukum yang mendiskriminasi berdasarkan gender.

Pengetahuan, sikap, dan praktek-praktek berkenaan dengan utilitas dan pelayanan perkotaan

- Akses formal pada infrastruktur dan pelayanan UDH (yakni penyediaan air, pengelolaan limbah dan sampah, akses pada jalan atau jalan setapak, listrik, tempat berteduh, lokasi perumahan, fasilitas-fasilitas rekreasi, penerangan publik, transportasi).
 - Siapa yang memberikan pelayanan tersebut (yakni pemerintah daerah, organisai non-pemerintah, perusahaan swasta)?
 - Berapa banyak persentase rumah tangga yang memiliki akses pada setiap pelayanan tersebut?
 - Apakah terdapat perbedaan gender dalam akses tersebut?
- Kualitas pelayanan UDH (untuk setiap jenis pelayanan)
 - Apakah layanan-pelayanan tersebut selalu tersedia?
 - Adakah perbedaan-perbedaan dalam ketersediaan, kuantitas maupun kualitas pelayanan secara musiman?
 - Apakah pelayanan tersebut memuaskan? Bagaimana meningkatkan pelayanan tersebut?
- Biaya dan kesediaan untuk membayar (untuk setiap jenis pelayanan).
 - Adakah upah untuk setiap layanan?
 - Siapa yang membayar tagihan-tagihannya (laki-laki atau perempuan di dalam rumah tangga) kepada siapa (yakni komite pengguna, pemerintah daerah, perusahaan swasta)?
 - Berapa banyak upahnya? Apakah upahnya memuaskan?
 - Apabila pelayanan tersebut ditingkatkan, apakah masyarakat mau untuk membayar? Seberapa banyak mereka mau membayar?
- Akses swasta, individual atau ilegal.
 - Penyediaan air: sumber-sumber air apa saja yang tersedia selain pelayanan-pelayanan formal (pancuran-

TIP

Tentukan keragaman pelayanan UDH yang tersedia dan identifikasi perbedaan akses berdasarkan gender terhadap pelayanan tersebut.

TIP

Find out how UDH management responsibilities are shared among women and men

- pancuran umum, sungai-sungai, tangki-tangki, tangki yang dimiliki pribadi, sumur-sumur umum)? Seberapa jauh layanan-pelayanan tersebut? Siapa yang mengumpulkan, mengangkut dan menyimpan air (laki-laki atau perempuan) dan bagaimana hal-hal tersebut dilakukan? Berapa banyak waktu yang digunakan untuk melakukannya?
- Pembuangan sampah/limbah: Apabila ada, aturan-aturan apa saja yang mengatur pembuangan sampah? Siapa saja yang berperan penting dalam hal ini (laki-laki atau perempuan)?
 - Listrik: Adakah akses yang ilegal terhadap listrik? Bagaimana hal itu dilakukan?
 - Lokasi tempat berteduh dan perumahan: Adakah lokasi yang diduduki secara tidak sah? Berapa lama mereka mendudukinya?
- Pembagian gender atas tenaga kerja dalam pengelolaan UDH.
 - Siapa yang berperan utama dalam rumah tangga (laki-laki atau perempuan) dalam mengelola fasilitas-fasilitas UDH?
 - Siapa dalam rumah tangga (laki-laki atau perempuan) yang menentukan penggunaan dan pengalokasian air, listrik dan tempat perlindungan?

Pengetahuan, sikap dan praktek sanitasi dan lingkungan.

- Pendidikan kebersihan dan lingkungan: Apakah isu-isu mengenai kebersihan dan lingkungan diajarkan di dalam keluarga, di sekolah, atau di dalam masyarakat? Adakah kampanye-kampanye untuk pemberitahuan? Seberapa paham kaum laki-laki dan kaum perempuan memahami pesan-pesan yang disampaikan?
- Aturan-aturan sanitasi
 - Apa saja aturan-aturan saniter/kakus untuk laki-laki dan perempuan?

TIP

Gali berbagai
prioritas untuk kaum
laki-laki dan kaum
perempuan.

- Bagaimana menjamin adanya privasi? Apakah tabu menggunakan kakus bersama-sama di antara laki-laki dan perempuan, dan di antara anggota keluarga?
- Pemeliharaan sampah (padat) dan limbah cair
 - Bagaimana sampah (padat) dikumpulkan dan dibuang? Oleh siapa?
 - Apakah buangan tersebut didaur ulang? Apabila ya, siapa yang mengumpulkan sampah-sampah tersebut (yakni masyarakat, perusahaan-perusahaan kecil dan menengah untuk mendaur ulang)

Kendala terhadap akses dan pengendalian/kontrol (isu-isu yang bukan UDH)

- Akses pada sumber daya-sumber daya atau layanan-pelayanan produktif.
 - Bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan dalam mengakses kesempatan kerja dan kesempatan mendapatkan pendapatan, kredit, serta terhadap pasar?
 - Apakah disediakan pula bantuan eksternal untuk meningkatkan akses atau kontrol? Oleh siapa hal itu dilakukan?
- Ketersediaan dan akses pada layanan-pelayanan sosial (yakni kesehatan dan higiene, program melek-huruf): apakah tersedia bantuan eksternal?

Kebutuhan, prioritas, dan harapan

- Kebutuhan-kebutuhan: Apakah praktek dan kendala saat ini menciptakan perbedaan kebutuhan bagi laki-laki, perempuan dan orang-orang tua serta anak-anak sehubungan dengan pembuatan dan lokasi fasilitas-fasilitas dan pelayanan UDH? Apa saja kebutuhan-kebutuhan tersebut dan apa saja alasan-alasan yang mendasari perbedaan-perbedaan tersebut?
- Prioritas: Bagaimana perbedaan perempuan dan laki-laki dalam hal prioritas yang mereka tetapkan di antara berbagai macam pelayanan UDH? Apa alasan yang mendasari perbedaan-perbedaan tersebut?

- Harapan dari proyek, berdasarkan gender? Apa saja perbedaan perempuan dan laki-laki dalam hal harapan-harapan dalam hal berikut:
 - Partisipasi dalam perencanaan, pembuatan, penyusunan dan pemantauan serta evaluasi (M&E) selanjutnya.
 - Peluang-peluang kerja dalam pekerjaan sipil, pengumpulan sampah atau dalam perusahaan daur ulang, pembuatan bahan-bahan bangunan, di kantor-kantor yang terkait dengan proyek, dan sebagainya. Bagaimana pembagian tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan-kegiatan tersebut?
 - Kredit untuk pengembangan rumah dan untuk perusahaan-perusahaan ukuran kecil dan sedang serta kegiatan-kegiatan yang mendatangkan pendapatan.
- Kesiediaan memberikan kontribusi, berdasarkan gender. Bagaimana perbedaan perempuan dan laki-laki dalam hal kesiediaan mereka memberikan kontribusi sebagai berikut:
 - Tenaga kerja dalam konstruksi, tata buku, inventori pengadaan, persiapan makanan, perawatan periodik, dan sebagainya.
 - Memberikan sejengkal tanah, ruang, bahan-bahan bangunan lokal/setempat.

Dampak proyek

- Dampak yang dipilah berdasarkan gender
 - Apa saja dampak-dampak positif dan negatif dari proyek tersebut? Apa beda dampak proyek tersebut pada laki-laki dan perempuan? Sebagai contoh, apakah sangat mungkin bahwa peraturan-peraturan per wilayah memberikan dampak negatif terhadap kaum perempuan yang menjalankan usaha di rumah-rumah mereka?
 - Apakah manfaat-manfaat yang diberikan tersebar secara merata antara laki-laki dan perempuan?
 - Bagaimana mengurangi dampak-dampak negatif tersebut?
- Kelompok-kelompok yang dirugikan atau kelompok-kelompok yang rentan.
 - Adakah kelompok-kelompok yang dirugikan atau yang rentan?

TIP

Tentukan bagaimana dampak proyek tersebut terhadap kaum perempuan dan kaum laki-laki, dan temukan cara-cara untuk mengurangi dampak-dampak negatifnya.

TIP

Tentukan harapan-harapan dari pihak-pihak yang akan mendapatkan manfaat dari proyek ini, tentang partisipasi proyek, peluang-peluang kerja, dan fasilitas-fasilitas kredit.

- Siapa mereka? Di mana mereka tinggal? Bagaimana karakter-karakter sosial-ekonomi mereka?
- Bagaimana proyek tersebut berdampak pada kelompok-kelompok ini?
- Akuisisi tanah/pemukiman kembali
 - Adakah akuisisi tanah atau pemukiman kembali yang diharapkan? Seberapa jauh?
 - Apa saja dampak spesifik terhadap kaum perempuan dan laki-laki?
 - Apakah kaum perempuan dan laki-laki memiliki preferensi yang berbeda berkenaan dengan lahan pemukiman kembali serta perumahan dan desain fasilitas?
 - Apakah diperlukan dukungan tambahan untuk kaum perempuan kepala keluarga?

Lingkungan tempat tinggal/masyarakat

- Sifat dasar masyarakat
 - Adakah masyarakat yang sangat rukun di dalam lingkungan tempat tinggal? Apakah dasar organisasinya?
 - Berapa tuakah usia masyarakat tersebut?
 - Apakah kaum laki-laki dan kaum perempuan sebagai pihak-pihak yang akan mendapatkan manfaat dari proyek ini yakin bahwa pendekatan berbasis masyarakat tersebut sesuai untuk menyampaikan layanan-pelayanan UDH yang spesifik? Mengapa demikian?
- Konflik-konflik antarmasyarakat atas penggunaan pelayanan UDH.
 - Adakah konflik-konflik atas distribusi penggunaan utilitas (yakni distribusi air) atau alokasi tanggung jawab untuk pengelolaan utilitas di dalam masyarakat (yakni tanggung jawab pengumpulan sampah)? Apabila ya, apakah konflik-konflik tersebut berdasarkan atas perbedaan gender, tingkat pendapatan, suku atau kasta, dan sebagainya? Bagaimana penyelesaian terhadap konflik tersebut? Apakah kaum perempuan terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut?

Partisipasi

- Faktor-faktor yang berpengaruh pada partisipasi
 - Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi kaum laki-laki dan kaum perempuan?
 - Apa saja insentif-insentif dan kendala-kendalanya?
- **Cara-cara:** cara-cara partisipasi seperti apa dalam kegiatan proyek yang disukai kaum laki-laki dan kaum perempuan (partisipasi dalam keputusan-keputusan perencanaan atau dalam pembuatan infrastruktur, kontribusi uang tunai, kontribusi tenaga kerja untuk konstruksi, pelatihan, operasi dan pemeliharaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan organisasi)? Mengapa?
- Organisasi-organisasi berbasis komunitas (CBO) dan organisasi-organisasi non-pemerintah
 - Apakah terdapat organisasi berbasis komunitas, baik formal maupun informal, seperti asosiasi-asosiasi penyewa, asosiasi-asosiasi pemilik properti, kelompok-kelompok pengguna air, atau kelompok-kelompok lingkungan tempat tinggal yang mengelola sampah? Apa saja peran-peran mereka serta tanggung jawab-tanggung jawab mereka? Apakah mereka cocok untuk kegiatan-kegiatan proyek tersebut?
 - Apakah kaum perempuan cukup terwakili dalam kelompok-kelompok tersebut?
 - Apakah terdapat organisasi nonpemerintah internasional atau nasional yang mendukung pengentasan kemiskinan serta gagasan-gagasan mengenai gender? Bagaimana proyek tersebut dapat dikaitkan dengan misi mereka?
 - Mekanisme-mekanisme apa yang dapat digunakan untuk meyakinkan adanya partisipasi aktif kaum perempuan dalam kegiatan-kegiatan proyek tersebut?
 - Organisasi-organisasi mana yang dapat digunakan untuk menggerakkan dan melatih kaum perempuan dalam kegiatan-kegiatan proyek tersebut?

Apabila dimungkinkan, pertimbangkan adanya penyediaan kesempatan kerja dan peluang yang mendatangkan pendapatan bagi kaum perempuan untuk mendorong mereka berpartisipasi (lihat Kotak 3). Kejar adanya kebijakan atas upah yang sama untuk kerja yang sama bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam seluruh kontrak.

Desain proyek

Komponen spesifik⁴

TIP

Secara aktif libatkan kaum perempuan dalam desain perumahan dan penentuan lokasi; hindari desain perumahan yang membuat kerja domestik kaum perempuan lebih membebani

TIP

Pertimbangkan transportasi khusus perempuan

Desain infrastruktur (misalnya, pasokan air, pengelolaan sampah, kesehatan, transportasi, fasilitas listrik, dan perumahan atau penampungan)

- Secara aktif melibatkan penerima bantuan perempuan dan laki-laki dalam menentukan jumlah, lokasi, dan jenis fasilitas kota dan layanannya, dan melibatkan berbagai pilihan mereka misalnya, bila relevan untuk:
 - Mempertimbangkan sistem penerangan publik yang berbiaya efektif dan jalan yang lebih aman bagi anak perempuan dan kaum perempuan di malam hari.
 - Mempertimbangkan ruang publik yang mudah diakses bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki.
 - Bila transportasi publik menjadi bagian dari pembangunan kota, pertimbangkan titik akses dan jadwal yang mudah dimengerti oleh kaum perempuan. Dimana penyatuan menjadi norma, pertimbangkan sarana transportasi khusus kaum perempuan.
 - Bila pembagian adalah norma, pertimbangkan untuk membuat ruang terpisah antara kaum laki-laki dan kaum perempuan (misalnya, gerbong khusus dalam kereta api, bis khusus kaum perempuan, ruang toilet perempuan di terminal bis atau stasiun kereta api) (lihat kotak 1).
 - Bila ada kebutuhan yang mereka hadapi, pertimbangkan pembangunan penampungan untuk kaum perempuan dan anak-anak yang membutuhkan (misalnya, rumah singgah untuk anak perempuan yang diperdagangkan, barak untuk anak-anak jalanan), atau

⁴Bagian ini diambil dari tulisan Woroniuk dan Schalkwyk (1998), the Habitat II Website (<http://www.cedar.ac.at/habitat/gender/gender.html>), dan berbagai dokumen proyek ADB.

rumah bagi kaum perempuan yang bekerja. Fasilitas seperti itu bisa dijalankan oleh lembaga swasta atau oleh LSM.

- Pertimbangkan lokasi fasilitas perkotaan (misalnya, kran air, fasilitas air) yang mudah diakses oleh kaum perempuan.
- Libatkan laki-laki dan perempuan penerima bantuan dalam menentukan desain perumahan dan lokasi serta menyatakan pilihan yang beragam. Misalnya:
 - Hindari desain perumahan yang hanya menambah pekerjaan domestik perempuan (misalnya, lantai tanah, terlalu disesaki bermacam-macam fungsi).
 - Pertimbangkan desain perumahan yang memberi ruang lapang bagi kaum perempuan dan fasilitasnya, seperti ruang untuk bekerja, fasilitas penyimpanan, dan pencahayaan, untuk kegiatan yang ditujukan untuk mencari pendapatan di rumah (lihat kotak 2). Syarat ruangan mungkin perlu dipertimbangkan dalam proses ini.
 - Pertimbangkan untuk menyediakan peralatan listrik di dapur dalam rumah murah sebagai antisipasi penggunaan peralatan listrik ke depannya (ini mungkin membuat keluarga yang bersangkutan menabung uang untuk membeli peralatan dari tabungan kerja).
 - Buat desain rencana rumah yang bisa dengan mudah diperluas ketika pendapatan keluarga meningkat.
 - Pertimbangkan lokasi perumahan dimana kaum perempuan mempunyai akses lebih baik atas air, fasilitas kesehatan, transportasi, dan keamanan.
- Gunakan teknologi yang layak demi kebutuhan kaum perempuan dan kaum laki-laki dan kapabilitas manajemen (misalnya, pasokan air, sarana kesehatan, sistem pembuangan limbah) dan juga bahan lokal, tradisi, dan lingkungan.

TIP

Kaum perempuan
 mungkin mempunyai
 jadwal yang berbeda
 dibandingkan
 dengan kaum laki-
 laki: mereka
 mungkin
 menggunakan
 layanan transportasi
 publik pada waktu
 yang berbeda-beda
 dan mengambil rute
 yang berbeda.
 Pertimbangkan
 kebutuhan kaum
 perempuan sebagai
 konsumen.

Kotak 1

Proyek Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Ketiga di Bangladesh, tahun 1997:

Menangani kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan atas pasar dan tempat berlindung.

Proyek Infrastruktur Pedesaan Ketiga (Third Rural Infrastructure Development Project) di Bangladesh merupakan contoh yang baik tentang bagaimana desain-desain infrastruktur fisik dapat menangani kebutuhan-kebutuhan khusus kaum perempuan serta partisipasi mereka. Proyek tersebut melibatkan peningkatan infrastruktur di kota-kota kecil serta wilayah-wilayah pedesaan yang mencakup jalan-jalan besar pengumpan, jembatan-jembatan dan urung-urung di sepanjang jalan-jalan besar pedesaan, tempat-tempat perlindungan terhadap banjir yang mendadak, dan pasar-pasar serta fasilitas-fasilitas berlabuh kapal di pusat-pusat pertumbuhan.

Di antara sekian banyak segi khusus-gender pada desain proyek tersebut, 2 aspek berikut ini harus disoroti, sebagai berikut:

Sudut-sudut tertentu untuk kaum perempuan di pasar-pasar pusat pertumbuhan

Proyek tersebut mendukung pembuatan sudut-sudut tertentu untuk kaum perempuan sebanyak 279 buah untuk memajukan usaha-usaha kaum perempuan pedagang. Lokasi-lokasi khusus untuk sudut-sudut tertentu tersebut di setiap pasar ditentukan oleh kaum perempuan sendiri dengan mengadakan konsultasi bersama para otoritas proyek. Fasilitas-fasilitas WC umum serta air untuk kaum perempuan telah dibangun. Kriteria seleksi serta peraturan-peraturan untuk kaum

perempuan pedagang yang memenuhi syarat untuk menggunakan ruang yang telah dikembangkan. Kriteria itu memastikan bahwa kaum laki-laki tidak mengatasnamakan kaum perempuan untuk mendapatkan ruang tambahan pada sudut-sudut tertentu untuk kaum perempuan tersebut.

Dengan bantuan organisasi-organisasi nonpemerintah perempuan, kaum perempuan penjual telah dilatih dalam manajemen toko, perijinan dagang, pajak serta toll, dan pengoperasian serta perawatan fasilitas-fasilitas tersebut. Lebih jauh, untuk memastikan bahwa terdapat cukup permintaan untuk pelayanan sudut-sudut tertentu untuk kaum perempuan tersebut, kegiatan-kegiatan motivasional yang ditujukan untuk para kaum perempuan dan para gadis sebagai konsumen sedang dilakukan untuk mendorong mereka agar menggunakan sudut-sudut tertentu untuk kaum perempuan tersebut.

Ruang untuk kaum perempuan pada tempat-tempat perlindungan dari banjir yang mendadak

Perempuan telah berpartisipasi dalam pemilihan lahan dan pembuatan tempat-tempat perlindungan. Desain tempat-tempat perlindungan tersebut memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi untuk ruang-ruang pribadi serta toilet-toilet untuk kaum perempuan dan untuk fasilitas-fasilitas perawatan medis darurat serta layanan-pelayanan yang ditujukan untuk kaum perempuan yang sedang mengandung.

STUDI
KASUS

Waktu operasional UDH

- Sedapat mungkin, pertimbangkan kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan dalam menentukan waktu pelayanan dan frekuensi layanan-pelayanan perkotaan (yakni waktu dan frekuensi penyediaan air, pengumpulan limbah padat/sampah, layanan-pelayanan bus dan kereta api).

Mekanisme pendanaan dan kredit (lihat kotak 2)

- Pertimbangkan untuk memberikan bantuan finansial melalui bantuan pemerintah, sektor swasta serta institusi-institusi keuangan LSM yang dapat mencapai kaum miskin perempuan dan kaum miskin laki-laki.
- Apabila pendekatan berbasis komunitas digunakan, beri perhatian terhadap kekuatan kaum perempuan untuk menggerakkan tabungan serta sumber daya-sumber daya.
- Lakukan berbagai konsultasi untuk memastikan adanya pertimbangan terhadap preferensi-preferensi laki-laki dan perempuan dalam hal:
 - Pengaturan pendanaan (biaya pengguna, uang tunai atau diganti dengan kontribusi tenaga kerja).
 - Perlakuan preferensi yang mungkin bisa dilakukan bagi keluarga-keluarga sangat miskin, keluarga yang dikepalai kaum perempuan, serta keluarga lain yang tidak beruntung.
 - Kemungkinan berhubungan dengan kredit atau dana-dana berputar masyarakat untuk UDH (lihat kotak 2). Jadwal pembayaran kembali dalam peraturan kredit seperti itu sebaiknya tetap mempertimbangkan pola pendapatan yang tidak teratur pada sektor informal perkotaan.
- Pertimbangkan untuk bisa menggunakan barang pribadi (yakni, lisensi-lisensi penjual) untuk memenuhi persyaratan jaminan.

Mekanisme partisipasi kaum perempuan (lihat kotak 3)

- Kembangkan *strategi partisipasi* yang langsung menangani partisipasi kaum perempuan dalam implementasi dan pemantauan serta evaluasi proyek. Hindari harapan-harapan yang terlampau tinggi atas partisipasi kaum perempuan dan mengembangkan jadwal praktis, mengingat kaum perempuan sering kali memiliki kendala waktu dan keuangan. Strategi-strategi tersebut mencakup:

Kotak 2

Bantuan kepada lembaga-lembaga pembiayaan berbasis-komunitas dan organisasi-organisasi nonpemerintah di India: Memenuhi permintaan kaum perempuan miskin atas tempat perlindungan yang layak

STUDI KASUS

India memiliki kekurangan fasilitas perumahan yang sangat parah: di dalam sektor perkotaan saja, perbedaan antara permintaan dan penyediaan berjumlah 17 juta unit. Tempat-tempat kumuh yang lazim ada di kebanyakan kota di India menunjukkan fakta tersebut. Para penghuni daerah kumuh tersebut meningkat jumlahnya sekitar 9%-10% setiap tahunnya. Kaum perempuan dan anak-anak paling banyak terkena dampak keadaan penghidupan yang parah ini seperti kekurangan tempat perlindungan dan layanan-layanan dasar. Sebagai jawabannya, pemerintah telah mendorong pembuatan lembaga-lembaga pembiayaan perumahan berorientasi pasar/*housing financing institution* (HFI) dan lembaga keuangan berbasis masyarakat/*community-based finance institutions* (CFI) yang mendasarkan pada kemiskinan. Terdapat juga perusahaan-perusahaan pembiayaan perumahan swasta, yang targetnya adalah rumah tangga dengan pendapatan menengah. Lebih lanjut lagi, organisasi non-pemerintah (ornop) dan organisasi masyarakat (ormas) terkadang membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam mengorganisir masyarakat-masyarakat yang senang berhemat dan berpiutang untuk memberikan dana bagi kaum miskin, biasanya kaum perempuan.

Proyek Pendanaan Perumahan di India (1997) mendukung seluruh saluran pendanaan perumahan yang beraneka ragam ini. Hal ini telah dicoba, untuk memajukan pinjaman yang sedang berjalan oleh para HFI, terhadap lebih banyak target CFI berbasis masyarakat dan ditujukan kepada

kaum miskin serta ornop-ornop/ormas-ormas. Pendekatan inovatif lainnya adalah yang disebut dengan "jaringan daerah kumuh" di mana usaha bersama terhadap perbaikan daerah kumuh dibuat oleh pemerintah, industri-industri swasta yang bertanggung jawab atas manajemen lingkungan di dalam masyarakat, serta ornop-ornop/ormas-ormas.

Sebagai contoh, di Ahmedabad, Perusahaan Kotapraja Ahmedabad (AMC) yang dibantu oleh pemerintah, industri-industri swasta yang dekat (seperti perusahaan penggilingan), dan masyarakat-masyarakat yang dilayani oleh ornop-ornop /ormas-ormas seluruhnya menyebabkan timbulnya biaya-biaya. Wilayah-wilayah kumuh terbagi dalam kelompok-kelompok paket yang nyaman, dan konsorsium-konsorsium industri yang terkenal serta ornop diminta untuk memberikan tawaran pekerjaan-pekerjaan atas nama masyarakat-masyarakat di dalam kerangka kerja desain yang dibuat oleh AMC. Masyarakat wilayah kumuh diwakili oleh komite-komite lingkungan tempat tinggal atau ornop/ormas-ormas atau keduanya. Sebelum sebuah wilayah kumuh dapat memenuhi syarat untuk dilakukan perbaikan, setiap keluarga harus menyumbang sebesar 2.100 rupee. Apabila rumah tangga tersebut tidak memiliki cukup tabungan, dapat disediakan hutang dari ornop pendanaan seperti Bank Self-employed Women Association (SEWA) dan Friends of women's banking. Sebagai agen masyarakat dari lembaga-lembaga pembiayaan mikro tersebut, kaum perempuan dari rumah tangga berpendapatan rendah memainkan peranan penting dalam memobilisasi sumber daya dari rumah tangga perorangan.

- *Penataan organisasional*: Apabila relevan (terutama apabila mengadopsi pendekatan berbasis-komunitas), pertimbangkan untuk mengorganisir kaum perempuan ke dalam kelompok-kelompok lingkungan tempat tinggalnya untuk meningkatkan kekuatan tawar-menawar serta keterampilan kepemimpinan. Apabila kelompok-kelompok yang diinginkan adalah kelompok campuran antara anggota laki-laki dan perempuan, maka pertimbangkan untuk menetapkan kuota untuk kaum perempuan dalam komite-komite eksekutif pada kelompok-kelompok tersebut.
- *Peraturan kelompok*: Apabila kelompok masyarakat formal diorganisir, tentukan secara jelas peraturan dan tanggung jawab-tanggung jawab para anggota. Buat mekanisme untuk menangani keluhan guna menyelesaikan konflik-konflik yang berhubungan dengan hak dan tanggung jawab pengguna.
- *Konstruksi*: pastikan bahwa kondisi kerja bersifat kondusif bagi partisipasi kaum perempuan (tingkat gaji yang setara-gender, musim pembuatan konstruksi, fasilitas-fasilitas toilet dan perawatan anak-anak).
- *Pemeliharaan fasilitas-fasilitas*: Pastikan bahwa kaum perempuan maupun laki-laki sama-sama dilatih dalam mengoperasikan dan memelihara (*operational & maintenance/O&M*) fasilitas-fasilitas.
- *Sanitasi dan kebersihan*: Manfaatkan kaum perempuan sebagai agen aktif, namun pastikan juga untuk melibatkan suami serta laki-laki pemimpin.
- *Monitoring dan evaluasi (M&E)*: Kembangkan mekanisme umpan balik dimana kaum perempuan dan laki-laki yang akan mendapatkan manfaat proyek tersebut memiliki hak suara.
- *Organisasi non-pemerintah/organisasi berbasis-komunitas kaum perempuan*: Identifikasi organisasi-organisasi yang memajukan partisipasi kaum perempuan selama implementasi dan pemantauan serta evaluasi.

TIP

Pertimbangkan untuk memastikan target-target partisipasi kaum perempuan dalam komite-komite eksekutif; memberikan pelatihan kepemimpinan bagi kaum perempuan

Ketenagakerjaan

- Pastikan adanya kesempatan kerja yang sama pada proyek tersebut baik untuk laki-laki maupun perempuan (konstruksi, manufaktur bahan-bahan bangunan,

pengumpulan sampah skala kecil maupun menengah, perdagangan, atau perusahaan-perusahaan pendaur ulang).

- Pastikan kaum perempuan dan laki-laki yang menjalankan usahanya di dalam rumah tidak dirugikan oleh peraturan-peraturan perwilayahan.
- Sedapat mungkin, pertimbangkan untuk menempatkan pengembangan-pengembangan perumahan yang baru agar dekat dengan pasar-pasar atau pusat-pusat manufaktur atau kedua fasilitas tersebut, untuk memberikan kesempatan-kesempatan bekerja yang lebih banyak bagi kaum laki-laki maupun perempuan.

Pertimbangan-pertimbangan pemenuhan syarat untuk menjalankan program perumahan

- Buat kriteria yang tidak mendiskriminasi laki-laki maupun perempuan dengan pekerjaan-pekerjaan yang kurang stabil. Sebaliknya, kaum perempuan, yang biasanya tidak terwakili dalam sektor pekerjaan formal, akan terkena dampaknya secara tidak proporsional. Pertimbangkan adanya perhitungan-perhitungan pendapatan yang fleksibel, seperti memasukkan pendapatan-pendapatan tidak tentu dari setiap anggota keluarga mereka daripada hanya dari pendapatan stabil setiap kepala rumah tangga. Harus dipertimbangkan pula sebuah alternatif untuk menyediakan perumahan bagi mereka yang berpendapatan rendah.
- Pastikan bahwa rumah tangga-rumah tangga yang dikepalai kaum perempuan termasuk memenuhi syarat untuk menerima manfaat proyek.
- Pertimbangkan adanya kriteria pemenuhan syarat yang lebih disukai bagi kaum miskin, kaum yang belum beruntung/dirugikan, serta rumah tangga-rumah tangga yang dikepalai kaum perempuan. Apabila dimungkinkan, pertimbangkan adanya kuota bagi mereka.
- Minimalkan pekerjaan di atas kertas serta prosedur-prosedur birokratis untuk mendorong kaum perempuan dan laki-laki yang tidak berpendidikan atau buta huruf, untuk mengajukan lamaran.

Pertimbangan lamanya masa tinggal (lihat juga kotak 3)

- Dorong kaum perempuan maupun laki-laki untuk mendapatkan kepemilikan maupun penyewaan yang aman. Selain itu, apabila hak kepemilikan maupun hak tinggal habis, akan dilakukan perpanjangan secara otomatis. Di tempat-tempat di mana kaum wanita bisa mengoperasikan usaha kecilnya dan menghasilkan pendapatan, ada kecenderungan untuk memperluas pembangunan rumah.
- Ketika sebuah proyek perumahan direncanakan di daerah pinggiran kota, daripada merelokasikan seluruh rumah tangga kaum miskin ke lahan baru, pertimbangkan agar

Kotak 3

Proyek Pendanaan Perumahan di India, tahun 1997: Mendukung Kaum Perempuan Pekerja Rumahan melalui Perbaikan Tempat-tempat Perlindungan dan Pengurangan Tingkat Kemiskinan Terintegrasi

STUDI KASUS

Proyek Pendanaan Perumahan yang telah disebutkan pada Kotak 2 juga memberikan kesempatan-kesempatan untuk mendatangkan pendapatan bagi kaum perempuan dan laki-laki berpendapatan rendah. Hal tersebut memiliki 2 pendekatan sampai dengan akhir. Pendekatan “workshed-cum-shelter” mendukung kaum miskin, yang utamanya perempuan, yang melakukan pekerjaan kerajinan tangan di rumah. Masyarakat penenun dengan tangan atau masyarakat perajin tangan atau perusahaan-perusahaan yang dipilih oleh negara memberikan dana-dana yang disubsidi untuk tempat-tempat berlindung atau bekerja bagi anggota kaum perempuan/laki-laki. Pemerintah nasional memberikan tanah untuk tempat-tempat perlindungan atau bekerja. Untuk menghindari penjualan atau penyewaan tanah yang telah diberikan tersebut kepada pihak ketiga, proyek memberikan sebuah tempat, paling tidak 10 tahun, yang memberikan cukup waktu bagi para penghuni wilayah kumuh untuk mencari perumahan dan pekerjaan yang lebih baik.

Pendekatan lainnya adalah “productivity-cum-shelter”, dimana dana-dana disediakan langsung untuk kaum perempuan berpendapatan rendah untuk membangun kegiatan-kegiatan yang mendatangkan pendapatan di luar rumah mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Kotak 2, institusi-institusi pendanaan berbasis masyarakat yang inovatif seperti Bank Self-employed Women Association (SEWA) agar memberikan pinjaman untuk mendatangkan pendapatan. Hal ini khususnya penting bagi kaum perempuan karena keluarga jarang memiliki harta atas nama perempuan dalam anggota keluarga. Dengan demikian, penciptaan aset-aset seperti toko-toko, kereta-kereta, tanah-tanah, atau rumah-rumah atas nama perempuan sangat penting dalam memberdayakan mereka seperti akuisisi modal, rekening-rekening bank, saham-saham, dan sertifikat-sertifikat simpanan. Pendekatan “productivity-cum-shelter” ini pun mendukung pembentukan kapasitas para peminjam melalui pelatihan pengembangan, bantuan dalam mengidentifikasi sumber bahan mentah, pengadaan alat-alat dan perlengkapan agar lebih baik, dan bantuan dalam membangun hubungan dengan pasar.

sebagian dari mereka tetap tinggal di lahan dengan memberi tanah hibah (direkomendasikan atas nama bersama suami dan istri) dan menyediakan tempat berlindung yang aman dan memperluas pelayanan ke tempat tersebut. Dengan demikian kaum miskin dapat kembali menduduki tanah di pusat kota dimana mereka biasanya tinggal dan memiliki sebuah sumber mata pencaharian.

Penyebaran informasi dan strategi pemasaran (lihat juga catatan kaki 2)

TIP

Jika tidak mungkin menyediakan pelayanan penyediaan air perkotaan selama 24 jam, hindari memberikan penyediaan air di waktu malam hari, yakni ketika kaum perempuan sering menjadi sasaran penyerangan pada saat mereka mengambil air dari keran-keran umum.

- Arahkan pesan-pesan mengenai kebersihan lingkungan langsung kepada kelompok gender yang relevan, berdasarkan pembagian tenaga kerja berdasarkan gender. Sebagai contoh, apabila kaum perempuan bertanggung jawab membuang sampah padat, kampanye-kampanye informasi harus diarahkan langsung kepada mereka, dan agar berhasil, harus dikembangkan sebuah strategi komunikasi khusus.
- Apabila kaum perempuan merupakan target informasi atau kampanye-kampanye pemasaran, pertimbangkan untuk menyewa pejabat-pejabat perempuan untuk memperoleh informasi agar berhasil dengan efektif.
- Mempertimbangkan untuk mengajak organisasi non-pemerintah/organisasi komunitas perempuan untuk menyebarkan informasi dan memasarkan perusahaan-perusahaan pemasaran.

Pertimbangan pelatihan

- Apabila dimungkinkan, pertimbangkan untuk mengadakan pelatihan dalam ketrampilan-ketrampilan yang bisa dipasarkan (yang laku) yang terkait dengan pembangunan pembangunan proyek (misalnya menyusun batu bata, pertukangan kayu, pengelasan, pertukangan batu, dan lain-lain) untuk memberi kesempatan-kesempatan mereka mendapatkan pendapatan tambahan.
- Apabila dimungkinkan, pertimbangkan untuk menyediakan beasiswa untuk mendorong kelompok-kelompok miskin berpartisipasi dalam pelatihan.

- Untuk pembangunan perumahan, pertimbangkan untuk memberikan pelatihan pada kaum perempuan dan laki-laki dalam bidang hukum mengenai hukum-hukum dan peraturan tanah dan properti.
- Berikan pelatihan kesadaran-gender kepada seluruh staf proyek baik perempuan maupun laki-laki.
- Latih para pejabat lembaga pelaksana serta staf proyek dalam M&E yang peka-gender.
- Pertimbangkan untuk bekerjasama dengan erat dengan LSM-LSM/ormas-ormas dalam melatih para peserta yang akan mendapatkan manfaat dari proyek tersebut.

Kerangka Kerja Proyek Keseluruhan

Sasaran

- Pastikan bahwa tujuan sektor dan proyek berfokus pada pengentasan kemiskinan, pengembangan manusia, dan kesetaraan gender.

Pendekatan

- Apabila tidak terdapat cukup pengalaman dalam UDH yang peka-gender, lakukan eksplorasi pendekatan proyek percontohan,.
- Tentukan tingkat kepraktisan cakupan wilayah proyek, berdasar kapasitas lembaga pelaksana dan peserta-peserta masyarakat yang telah dinilai.

Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum perempuan

- Identifikasi cara-cara untuk menghubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan pendapatan, kegiatan melek-huruf dan kegiatan-kegiatan lain untuk mendukung sebuah pendekatan terintegrasi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pemberdayaan kaum perempuan (berhubungan dengan proyek-proyek yang sedang berjalan atau proyek-proyek kredit mikro pada masa mendatang, penyebaran informasi atau layanan-layanan yang tersedia, sebagai komponen proyek).

TIP

To reach women more effectively, consider hiring female information officers

Kotak 4

Proyek Pengembangan Perkotaan dan Pengelolaan Lingkungan Pantai Karnataka di India, tahun 1999: Fokus kepada Partisipasi Perempuan dan Pengurangan Tingkat Kemiskinan

STUDI KASUS

Proyek Pengembangan Perkotaan dan Pengelolaan Lingkungan Pantai Karnataka di India, yang merupakan sebuah proyek perkotaan yang menyeluruh di India, melakukan tindakan nyata untuk memajukan partisipasi kaum perempuan dan memerangi kemiskinan di mana kaum perempuan memikul beban yang tidak proporsional.

Proyek ini akan menginvestasikan dalam infrastruktur perkotaan dan layanan-layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan memfasilitasi pembaruan-pembaruan kebijakan untuk memperkuat pengelolaan perkotaan di sepuluh kota di Karnataka Barat. Proyek tersebut memiliki enam komponen: (i) membangun kapasitas untuk staf pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat melalui program kesadaran dan partisipasi masyarakat/ *community awareness and participation program* (CAPP); (ii) rehabilitasi dan perluasan penyediaan air; (iii) perbaikan-perbaikan lingkungan perkotaan melalui pengelolaan limbah, drainase air bah, dan pengelolaan sampah padat; (iv) perbaikan jalan dan jembatan; (v) pengelolaan lingkungan pantai; dan (vi) pengelolaan proyek dan dukungan logistik.

Penilaian sosial mengidentifikasi bahwa kaum perempuan dan anak-anak khususnya sangat dirugikan oleh keadaan penghidupan yang payah dan akses yang buruk pada pelayanan dasar perkotaan. Kaum perempuan yang hidup dalam lingkungan yang berasap dan tidak sehat di dalam rumah dan memiliki akses yang rendah pada pelayanan medis akan menanggung beban ekstra dan cenderung lebih mudah terkena penyakit. Anak-anak sangat rentan terhadap penyakit-penyakit dari air dan yang disebabkan oleh vektor. Kaum perempuan dan para gadis di dalam rumah tangga yang tanpa sambungan pipa, akan menggunakan waktu lebih dari sejam untuk mengumpulkan air.

Kebersihan dan sanitasi yang ditingkatkan melalui investasi-investasi infrastruktur di dalam proyek ini diharapkan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan dan produktivitas kaum perempuan. Namun, manfaat-manfaat proyek ini tidak akan berhenti sampai di situ. Komponen CAPP akan memungkinkan kaum perempuan dan laki-laki yang akan mendapatkan manfaat dari proyek ini berpartisipasi di dalam pembuatan proyek, implementasinya, pelaksanaan dan pemeliharannya/*operating and maintenance* (O&M), dan pemantauan serta evaluasi/*monitoring and evaluating* (M&E) melalui mekanisme-mekanisme peningkatan kesadaran dan umpan balik. Hal ini akan difasilitasi oleh sebuah konsorsium LSM-LSM di setiap distrik. CAPP mengakui bahwa keterwakilan kaum perempuan di dalam pembuatan keputusan adalah sangat penting. Sebuah jaringan perempuan pembuat keputusan, melibatkan perempuan para ketua dewan kotapraja dan perempuan anggota pemerintah kotapraja yang prihatin dengan hal ini, LSM-LSM perempuan, dan perwakilan-perwakilan masyarakat perempuan, akan dibentuk melalui CAPP. CAPP juga akan menyediakan berbagai pelatihan dan kegiatan-kegiatan penyadaran, termasuk pelatihan perempuan dalam pembangunan.

Selanjutnya, kaum miskin perempuan akan mendapatkan manfaat dari program perbaikan daerah kumuh, yang akan melibatkan tidak hanya perbaikan infrastruktur (yakni, air yang dapat diminum, sanitasi, drainase, jalan setapak yang memadai), namun juga simpanan-simpanan kelompok dan aktivitas-aktivitas kredit, pengembangan ketrampilan dan pelatihan kewirausahaan, serta kesempatan bekerja yang diberikan oleh proyek tersebut. Untuk memastikan bahwa kaum miskin perempuan mendapatkan manfaat yang sama, kegiatan-kegiatan tersebut akan dipantau oleh organisasi-organisasi nonpemerintah setempat dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat.

Penempatan staf, penjadwalan, penyediaan, dan penganggaran

- Pertimbangkan agar kaum perempuan bisa menduduki posisi-posisi pengawas proyek.
- Pekerjakan lebih banyak staf dari kaum perempuan untuk kantor proyek dan apabila mungkin untuk lembaga pelaksana.
- Lakukan pelatihan gender kepada lembaga pemberi pelayanan pada seluruh tingkatan organisasi.
- Apabila memungkinkan, tetapkan persentase minimum pekerja perempuan dan larang penggunaan tenaga kerja anak-anak dalam kontrak pekerjaan sipil.
- Apabila digunakan pendekatan berbasis komunitas, pastikan adanya penganggaran yang memadai dan fleksibel agar memungkinkan untuk diambil pendekatan “pembelajaran” (yakni anggaran pelatihan, anggaran pelayanan konsultasi untuk organisasi-organisasi perempuan).

Monitoring dan Evaluasi

- Kembangkan pengaturan M&E: (i) M&E internal oleh staf proyek; (ii) M&E eksternal oleh organisasi-organisasi nonpemerintah atau para konsultan, apabila perlu; dan (iii) pemantauan partisipatif oleh kaum laki-laki dan perempuan penerima manfaat dari proyek ini.
- Pilah semua indikator yang relevan berdasarkan gender.
- Indikator-indikator yang disarankan:
 - *Tingkat penggunaan infrastruktur UDH dan kesadaran di antara kaum laki-laki dan perempuan*, yakni, tingkat kepuasan, tingkat kesadaran, paket teknik yang dipilih, pola penggunaan, tingkat akses, luasnya cakupan layanan, kesadaran terhadap kebiasaan-kebiasaan yang higienis, waktu yang dihemat dalam mengambil air.
 - *Kesinambungan proyek*, yakni, perbaikan biaya, tingkat kegagalan, kebersihan fasilitas, jumlah kelompok pengguna dan para anggota (berdasarkan gender), jumlah rapat yang diadakan.

- *Pemberdayaan kaum perempuan*, yakni, jumlah kaum perempuan yang mendapatkan akses pada kredit, peningkatan pendapatan kaum perempuan, prospek karier untuk kaum perempuan yang dilatih di dalam proyek tersebut.

Dokumentasi

- Dokumentasikan aspek desain yang peka-gender dalam RRP (akan lebih baik sebagai sebuah strategi GAD untuk proyek) serta memasukkannya dalam perjanjian pinjaman untuk memastikan adanya mekanisme desain proyek yang peka-gender, yang harus ditaati oleh lembaga pelaksana (lihat tabel 1).

Kotak 5

Proyek II Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Kedua di Bangladesh, tahun 1995: Strategi-strategi untuk mengarus-utamakan gender.

Proyek II Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Kedua merupakan proyek pembangunan perkotaan menyeluruh yang mendukung kebijakan pemerintah untuk desentralisasi melalui komponen-komponen sebagai berikut: (i) rehabilitasi infrastruktur fisik (yakni, jalan-jalan dan jembatan, drainase, pengelolaan sampah padat, penyediaan air, sanitasi, pengembangan pusat kota); (ii) perbaikan daerah kumuh; (iii) proyek percontohan untuk perumahan bagi mereka berpendapatan rendah, rencana penggunaan tanah, dan swastanisasi pengelolaan sampah padat; dan (iv) pengembangan institusional unit pendukung *pourashava* (kotapraja perkotaan), Institut Nasional Pemerintahan Daerah, dan pusat-

pusat pelatihan regional di dalam 4 model *pourashava*.

Dalam proses selama pelaksanaan proyek, jelas bahwa partisipasi kaum perempuan dibatasi pada kegiatan-kegiatan di bawah komponen perbaikan wilayah kumuh seperti kesehatan, pendidikan, penyediaan air, pelatihan lingkungan, pembentukan kelompok, dan kegiatan yang mendatangkan pendapatan melalui pemberian kredit. Sementara komponen tersebut menjadi instrumen dalam mengetengahkan isu-isu mengenai gender dan partisipasi kaum perempuan bagi staf proyek, gender sebagai perhatian di sana-sini tidak diutamakan di dalam seluruh komponen lainnya.

Dengan bantuan Spesialis GAD Misi Tetap ADB, sebuah rencana tindakan GAD khusus-proyek, yang mencakup kegiatan-kegiatan pengarusutamaan gender, dikembangkan untuk meralat bagian proyek tersebut dan memberikannya sebuah fokus terhadap gender yang memadai dari sekadar "komponen perempuan". Pelatihan-pelatihan kerja dan konsultasi-konsultasi antara ADB dan agen pelaksana, Local Government Reengineering Department (LGED) dari Ministry of Local Government Rural Development and Cooperatives, diselenggarakan untuk memformulasikan rencana tersebut. Rencana tersebut memiliki hal-hal sebagai berikut:

- *Rencana/Aturan Institusional untuk mendukung pengarusutamaan GAD:* penunjukan seorang anggota senior di dalam tim konsultasi sebagai titik pusat GAD untuk mengkoordinir seluruh kegiatan GAD, termasuk persiapan pembuatan pedoman-pedoman GAD bagi LGED.
- *Mendukung GAD di pemerintahan daerah:* advokasi untuk pembentukan komite-komite mengenai gender dan lingkungan di dalam *pourashava-pourashava* yang akan diketuai kaum perempuan komisioner distrik kota; pembentukan kapasitas untuk kaum perempuan komisioner distrik kota; dan rekrutmen bagi kaum perempuan sebagai penaksir pajak, kolektor, dan pejabat.
- *Modifikasi desain infrastruktur:* pembuatan pasar-pasar dan terminal-terminal bus untuk memasukkan fasilitas-fasilitas bagi kaum perempuan (yakni, ruang tunggu, alat-alat keamanan, toilet-toilet, tempat pemesanan).

- *Pekerjaan:* advokasi untuk meminta agar para kontraktor menyewa tenaga kerja konstruksi dari kaum perempuan, dan advokasi untuk prinsip upah yang sama untuk pekerjaan yang sama antara laki-laki dan perempuan.
- *Pelatihan untuk kaum perempuan:* pelatihan "ward-based" bagi perempuan dan laki-laki yang akan mendapatkan manfaat dari proyek ini serta kaum perempuan komisioner distrik kota di dalam lingkungan, sanitasi, pengelolaan sampah padat, kesehatan dan higiene, dan pemeliharaan kakus-kakus, sumur-sumur, dan toilet-toilet umum.
- *Pelatihan kesadaran gender untuk staf proyek senior:* pelatihan untuk meningkatkan kesadaran kebijakan GAD ADB, kebijakan nasional untuk pengembangan kaum perempuan, rencana aksi nasional pemerintah untuk GAD, serta konsep-konsep dasar GAD.
- *Monitoring dan evaluasi yang peka-gender:* penggunaan indikator-indikator gender yang tak-teragregasi, mendesain ulang kuesioner-kuesioner survei rumah tangga, pembaruan buku tahunan *pourashava* untuk meralat fokus gendernya.

Selain itu, sementara rencana aksi GAD sedang dibuat, telah dipelajari bahwa kaum perempuan komisioner distrik kota di *pourashava-pourashava* tidak memiliki TOR yang jelas dan bahwa rancangan undang-undang pembaruan pemerintahan daerah baru-baru ini telah menghindari *pourashava-pourashava*. Isu ini diangkat pada tingkat yang lebih tinggi antara pemerintah dan ADB sebagai isu mengenai dialog kebijakan.

Dialog kebijakan

Apa yang dibahas dalam dialog kebijakan sangat bergantung pada penerimaan para badan pelaksana terhadap isu-isu gender, komitmen mereka untuk membantu menyelesaikan isu-isu tersebut, dan sifat dasar serta kompleksitas isu-isu tersebut. Dalam beberapa kasus, isu-isu gender yang diidentifikasi melalui analisis gender memerlukan reformasi hukum dan kebijakan yang dikombinasikan dengan proyek UDH. Dalam kasus lain, proyek UDH dapat dibuat untuk mendukung implementasi kebijakan atau hukum yang baru. Di dalam kasus apa pun, desain proyek harus sesuai dengan hukum atau kebijakan. Dialog kebijakan yang terus menerus dengan mitra DMC sangatlah penting.

Dialog kebijakan juga harus menegaskan bahwa mitra (*counterpart*) DMC memahami isu-isu utama gender dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya dan menyediakan sumber daya yang memadai.

Beberapa isu potensial yang akan didiskusikan selama dialog tingkat proyek dan kebijakan dengan mitra DMC disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2

Agenda yang mungkin untuk dilakukan pada dialog kebijakan

ISU-ISU UTAMA	LANGKAH AKSI UTAMA
Pembangunan kapasitas gender dan partisipasi untuk EA	<ul style="list-style-type: none"> • Pertimbangkan TA untuk pelatihan gender dan partisipasi bagi seluruh pejabat dan staf EA, dengan menekankan pada implementasi proyek. • Dapatkan dukungan lembaga perempuan nasional, termasuk entitas-entitas semacam itu misalnya Kementerian Urusan Perempuan.
Kerja sama pemerintah dan organisasi nonpemerintah	Cari peluang EA untuk bekerja dengan organisasi-organisasi perempuan non-pemerintah dalam memberikan pelayanan serta pembentukan strategi.
Pengaturan staf	Dapatkan komitmen EA untuk meningkatkan jumlah staf tetap perempuan.
Penganggaran	Alokasikan dana untuk melatih kesadaran gender dan pelatihan untuk kaum perempuan, serta kesempatan-kesempatan yang sama untuk bekerja bagi perempuan.
Pekerjaan sektoral	Sarankan sektor pekerjaan terpisah atau adanya bantuan yang saling mendukung untuk menyelidiki isu-isu mengenai hukum dan kebijakan yang mendiskriminasi secara gender atau berdasarkan sektoral (yakni, hukum waris atau aturan keluarga yang mengandung klausul yang mendiskriminasi hak-hak perempuan atas kepemilikan tanah dan properti).
Reformasi hukum dan kebijakan	Pertimbangkan untuk memasukkan reformasi hukum dan kebijakan dalam proyek tersebut untuk meningkatkan keterlibatan kaum perempuan (lihat kotak 5 contoh isu-isu mengenai kebijakan dalam gender dan peraturan daerah).

Appendix TOR untuk Spesialis Gender

STUDI KELAYAKAN PPTA

- Sebagai bagian dari analisis sosial, lakukan analisis gender partisipatif bekerjasama dengan para spesialis lainnya (yakni para ilmuwan sosial, spesialis higiene, dan spesialis partisipasi masyarakat).
- Identifikasi profil sosial-ekonomi kelompok-kelompok stakeholder utama di dalam populasi target dan memilah data berdasarkan gender. Menganalisis hubungan antara kemiskinan dan gender.
- Periksa perbedaan gender dalam hal pengetahuan, sikap, praktek, peran-peran, kendala-kendala, kebutuhan-kebutuhan, dan prioritas-prioritasnya di dalam pembangunan perkotaan dan sektor perumahan, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan-perbedaan tersebut.
- Nilai kapasitas kaum laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- Nilai proyek berdasarkan gender dan berbagai pilihan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak yang merugikan.
- Identifikasi lembaga pemerintah, non-pemerintah dan organisasi-organisasi berbasis komunitas, serta kelompok-kelompok perempuan yang dapat digunakan selama PPTA dan implementasi proyek. Mengakses kapasitas mereka.
- Tinjau kembali kebijakan dan kerangka hukum yang terkait (hukum waris, hukum pertanahan, aturan keluarga, kelompok masyarakat yang dilindungi hukum), apabila diperlukan.
- Berdasarkan analisis, kembangkan desain proyek yang responsif-gender dan partisipatif serta pembaruan pekerjaan sektor dan pembaruan sektor/kebijakan selanjutnya, apabila diperlukan.
- Kembangkan strategi gender proyek, yang masukkan ukuran-ukuran spesifik untuk memajukan, memfasilitasi dan memastikan adanya partisipasi aktif dari kaum perempuan dan untuk memusatkan perhatian-perhatian khusus mereka dalam keseluruhan kegiatan proyek.
- Kembangkan mekanisme dan indikator-indikator M&E yang responsif-gender.
- Persiapkan terms of reference untuk implementasi dan konsultansi M&E.

IMPLEMENTASI PROYEK DAN BANTUAN M&E

- Kembangkan atau, apabila telah ada, sempurnakan strategi gender untuk proyek tersebut dan tinjau kembali rencana implementasi.
- Bantu kantor proyek dalam merekrut staf untuk memastikan adanya keterwakilan kaum perempuan yang sama serta terfokus pada gender. Melaksanakan pelatihan kesadaran gender untuk staf proyek pada seluruh tingkatan. Memelihara tingkat kesadaran gender yang diinginkan.
- Bantu merekrut perempuan penggerak masyarakat, apabila diperlukan. Melaksanakan pelatihan gender bagi mereka. Menilai kebutuhan-kebutuhan pelatihan pada kaum perempuan yang akan mendapatkan manfaat dari proyek tersebut dalam pembangunan perkotaan dan perumahan. Mengawasi pelatihan tingkat masyarakat untuk kaum perempuan ini untuk memastikan adanya kecukupan pelatihan teknis dan keterampilan di dalam pembangunan perkotaan dan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka.
- Bantu kantor proyek dalam memantau implementasi proyek. Memberikan perhatian khusus kepada resistensi yang potensial atas partisipasi kaum perempuan dan memfasilitasi adanya resolusi terhadap konflik, apabila diperlukan.
- Nilai kebutuhan-kebutuhan lain dari perempuan penerima manfaat dari proyek ini (kredit, program melek-huruf, pelatihan keterampilan untuk datangkan pendapatan) pada saat diperlukan, dan mengusulkan cara-cara praktis untuk memusatkan perhatian pada kebutuhan-kebutuhan di dalam proyek ini kepada kantor proyek.
- Bantu konsultansi BME dalam mengumpulkan data yang tak-teragregasi secara gender serta data khusus-perempuan. Membantu kaum perempuan penggerak masyarakat (apabila ada) dalam memobilisasi kaum perempuan yang akan mendapatkan manfaat dari proyek ini untuk melakukan pemantauan dan evaluasi partisipatif. Dari temuan-temuan tersebut, usulkan ukuran-ukuran korektif yang diperlukan kepada kantor proyek.

Referensi Terpilih

- Asian Development Bank. 2000. *Gender Checklist on Water Supply and Sanitation Projects*. Manila: ADB.
- Chant, S. 1996. *Gender, Urban Development and Housing*. Publication Series for Habitat II, Volume 2. United Nations Development Programme.
- Fong, Monica, Wendy Wakeman, dan Anjana Bhushan. 1996. *Toolkit on Gender in Water and Sanitation*. Gender Toolkit Series No. 2. Washington, D.C.: World Bank.
- Habitat II Website. *Decent Shelter: A Women's Right*. <http://www.cedar.ybuvue.ac.at/habitat/gender/gender.html>
- Haryantiningsih. 1997. *Urban Water Supply: Experiment to Investigate Women's Role as Customers*. Final Report to the World Bank. Jakarta, Desember.
- Woronluk, B., dan J. Schalkwyk. 1998. *SIDA Equality Prompt Sheets #1-17*. Stockholm: SIDA, November.